

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menekan lonjakan kasus COVID-19, salah satunya dengan membuat kebijakan vaksinasi nasional. Vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan transmisi COVID-19 yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh (herd immunity) populasi ketika 70% dari total sasaran telah mendapatkan vaksinasi lengkap (Heryana, 2021). Indonesia mulai menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 pada akhir tahun 2020. Pemerintah Indonesia menargetkan setidaknya 208.265.720 penduduk telah tervaksinasi hingga Desember 2021 (Kementerian Kesehatan, 2021). Perkembangan cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Cakupan Vaksinasi COVID-19 Dosis 1 dan Dosis 2 di Indonesia Bulan Januari 2021 Hingga Oktober 2021

Jenis Dosis	Capaian Vaksinasi Covid-19 Januari 2021- Agustus 2021									
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
Dosis 1	0,24%	0,90%	3,72%	5,91%	7,72%	13,35%	22,13%	30,80%	43,16%	57,52%
Dosis 2	0,01%	0,51%	1,69%	3,64%	5,08%	6,44%	9,11%	17,54%	24,45%	35,46%

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dengan strategi penahapan prioritas penerima vaksin, hingga Oktober 2021 setidaknya 57,52% orang Indonesia telah divaksin dosis 1 dan 35,46% telah divaksin dosis 2. Meski cakupan vaksinasi COVID-19 terus meningkat setiap bulan namun capaian tersebut masih belum merata dan belum mencapai target

yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu hambatan dalam penanganan COVID-19 adalah tingginya berita bohong yang beredar khususnya terkait vaksinasi COVID-19 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Berita bohong merupakan sebuah informasi yang direkayasa dengan cara memutarbalikkan atau mengaburkan suatu fakta sehingga penerima pesan tidak memperoleh informasi yang benar (Widyawati, 2020). Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang benar dan salah. Namun secara sadar atau tidak sadar masih banyak orang yang terpengaruh oleh berbagai gangguan informasi yang disebut dengan *Information Disorder Syndrome*. Gangguan tersebut meliputi distorsi fakta, manipulasi informasi, asal berbagi tanpa mengetahui konsekuensinya, menghina keyakinan, propaganda baik dengan atau tanpa kepentingan pribadi (Kandel, 2020). Terdapat tiga macam gangguan informasi, diantaranya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi (Wardle, 2017).

Hal tersebut sejalan dengan laporan yang menjelaskan bahwa pada bulan Januari 2020 hingga bulan Oktober 2021 terdapat 5.036 berita bohong tentang COVID-19. Dari jumlah tersebut, 4.914 berita bohong sudah ditindaklanjuti dan 122 lainnya sedang ditindaklanjuti oleh *platform* digital yang bersangkutan (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Tabel 1.2 menunjukkan sebaran berita bohong terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

Tabel 1.2 Total Berita Bohong Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Bulan Januari 2021 Hingga Oktober 2021

Tingkat Isu Berita Bohong Vaksinasi COVID-19 Januari 2021-Agustus 2021										
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Total
49	18	34	26	26	35	36	22	23	25	294

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2021

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa total kumulatif berita bohong vaksinasi COVID-19 mulai Januari 2021 hingga bulan Oktober 2021 berjumlah 294 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Pemberitaan bohong paling tinggi terjadi pada awal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimana informasi yang benar sangat dibutuhkan masyarakat namun intervensi pemerintah terlalu lambat sehingga kesempatan tersebut digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong termasuk opini pribadi (Yustitia and Ashrianto, 2020).

Seiring meningkatnya berita bohong tersebut nyatanya terjadi peningkatan jumlah pengguna internet selama pandemi COVID-19 tahun 2021 dari 175,4 juta pengguna menjadi 202,6 juta (Kominfo, 2021). Peningkatan jumlah pengguna internet menunjukkan cepatnya penyebaran informasi dan memperlihatkan bahwa sangat mudah mengakses internet khususnya sosial media sehingga apabila penggunaannya tidak dilakukan dengan bijak maka dapat mendukung maraknya berita bohong yang beredar (Harahap dan Adeni, 2020). Terlebih pada masa tersebut media sosial menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam memantau perkembangan kasus COVID-19 (Kalia, 2021). Persebaran berita bohong pada beberapa sosial media dibuktikan sebagaimana Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Persebaran Konten Berita Bohong Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan Platform Periode Oktober 2021

Platform Digital	Sebaran
Facebook	2.100
Twitter	108
Youtube	43
Tiktok	21
Instagram	18
Total	2.290

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2021

Tabel 1.3 menunjukkan persebaran berita bohong vaksinasi COVID-19 yang terletak pada platform media sosial Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan Tiktok. Persebaran terbanyak terletak pada platform facebook, yakni sebesar 2.100 sebaran (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Jumlah tersebut terus ada dan meningkat setiap bulan meski pemerintah telah memiliki kebijakan berupa pembentukan Badan Siber Nasional, kerja sama dengan facebook atau beberapa instansi lain (Rasidin et al., 2020). Dengan begitu tingginya berita bohong perlu segera ditanggulangi karena akan memberi dampak negatif, diantaranya membuat masyarakat sulit mengetahui kebenaran sebuah informasi, membuat kesalahpahaman yang berdampak pada persatuan antar masyarakat, menimbulkan opini publik yang provokasi, membuat adu domba di masyarakat, dan menciptakan keresahan publik (Maulana, 2017). Selain itu dapat menimbulkan kepanikan, perilaku irasional, dan pengaburan masalah (Prajarto, 2021).

Pada tahun 2021, *World Health Organization* (WHO) berupaya menanggulangi penyebaran berita bohong dengan membuat agenda

penelitian kesehatan masyarakat untuk manajemen infodemik. Infodemik merupakan suatu kondisi dimana banyaknya informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyebabkan pembaca kebingungan membedakan informasi kredibel dan tidak (Yuliarti, 2020). Pada agenda kelima manajemen infodemik, yakni *promote the development, adaptation and application of tools for managing infodemics*, diketahui bahwa dalam mengatasi berita bohong perlu pendekatan multidisiplin. Hal tersebut disebabkan karena komunitas yang berbeda menunjukkan perbedaan pada tingkat literasi dan pendidikan, hubungan dan pola penggunaan teknologi, tingkat internet, biaya akses, dan kemampuan menilai informasi dengan kritis (World Health Organization. Regional Office for Europe, 2021). Dijelaskan pula bahwa manajemen infodemik memiliki empat pilar untuk diterapkan. Pertama, *facilitate accurate knowledge translation*. Kedua, *knowledge refinement, filtering, and fact checking*. Ketiga, *build eHealth literacy*. Keempat, *monitoring infodemiology, infoveillance, and social listening*. Manajemen infodemi tersebut penting untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan akibat tingginya berita bohong (Eysenbach, 2020).

Hal tersebut mengingatkan bahwa sumber informasi yang transparan, berkelanjutan, dan mudah dipahami terkait vaksinasi merupakan strategi promosi kesehatan yang dapat mendukung pencegahan COVID-19 dan membantu memutus rantai penularan (EUPHA et al, 2021). Di Indonesia, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda

terdepan memiliki peran penting dalam program preventif dan promotif. Program promosi kesehatan sendiri merupakan program wajib di Puskesmas. Berkaitan dengan program tersebut Pemerintah Indonesia memiliki strategi dalam mengatasi berita bohong, yakni dengan sosialisasi dan edukasi melalui penempelan media poster di beberapa wilayah puskesmas (Hidayat et al, 2021). Tidak hanya poster tetapi juga melalui majalah, website resmi, banner, siaran radio, dan kanal sosial media resmi. Selain itu juga memfasilitasi masyarakat dengan membuat tempat pengaduan berita bohong melalui *website*, *email*, *contact center*, dan *hotline* (Widyawati, 2020).

Meski dilakukan berbagai upaya hingga lebih dari sepuluh bulan pelaksanaan vaksinasi berita bohong masih tetap ada. Beberapa kendala yang sering dialami, diantaranya kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana FKTP, strategi pengembangan organisasi promkes, sikap dan kepatuhan masyarakat (Hidayat et al, 2021). Survei nasional tahun 2020 juga mengungkapkan bahwa sebesar 64-79% responden nyatanya tidak mampu mengenali berita bohong di media sosial sedangkan media sosial adalah sumber informasi yang utama (Kruglinski, 2021). Salah satu penyebab tingginya penyebaran berita bohong terkait isu-isu kesehatan khususnya vaksinasi adalah rendahnya literasi kesehatan masyarakat (Fitriarti, 2019). Namun untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan penggunaan teknologi tetapi individu harus kritis terhadap konten media baru sehingga

diperlukan pelatihan cek fakta, penyediaan aplikasi cek fakta, dan penyediaan materi (Mansyur, 2020).

Fact-checking (pemeriksaan fakta) merupakan kegiatan menemukan kebenaran dan akurasi dari informasi yang telah beredar di masyarakat (Wardle, 2018). Verifikasi informasi diposisikan sebagai keterampilan utama untuk pembaca berita dengan begitu seseorang akan memiliki kemampuan untuk menghindari berita bohong yang beredar dan mampu mencari informasi yang kredibel juga mampu mengambil tindakan yang benar untuk mendapat informasi. Dijelaskan pula individu yang memiliki tingkat literasi yang tinggi cenderung memiliki kemauan melakukan verifikasi informasi daripada individu yang memiliki tingkat literasi rendah karena memiliki pengetahuan lebih tinggi, mampu untuk berpikir kritis dan memegang kendali pribadi (Edgerly et al., 2020).

Penemuan sebuah informasi yang kredibel dapat tergambarkan oleh individu itu sendiri menurut Johnson (1995) pada teori *A Comprehensive of Information Seeking*. Teori ini mengungkapkan bahwa penemuan informasi tersebut dipengaruhi oleh *antecedents factor* (latar belakang) mencakup faktor *demographics*, *direct experience*, *salience*, dan *beliefs*. Lalu *information carrier factors* yang mencakup *characteristic* dan *utility*. Sehingga menghasilkan penemuan informasi yang akurat dari berbagai sumber terpercaya sesuai permasalahan yang dialami oleh individu (Johnson et al., 1995).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan informasi yang akurat, contohnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) membuat *Hoax Buster* pada platform pemerintah covid-19.go.id. Media-media di Indonesia juga ikut serta membuat situs pemeriksa fakta, seperti Tirto.id, Kompas.com, Tempo.co, Liputan6.com, dan Suara.com yang menggunakan *International Fact Checking Network* (IFCN) untuk verifikasi (Prajarto, 2021) turnbackhoax.id, cekfakta.com, dan lain sebagainya (Mansyur, 2020). Namun menurut Survei CIGI dan Ipsos tahun 2019 dapat diketahui bahwa hanya 41% masyarakat Indonesia yang memilih menggunakan situs *fact-checking* ketika menghadapi berita bohong (Ipsos Public Affairs, 2019). Sebagaimana Tabel 1.4 berikut:

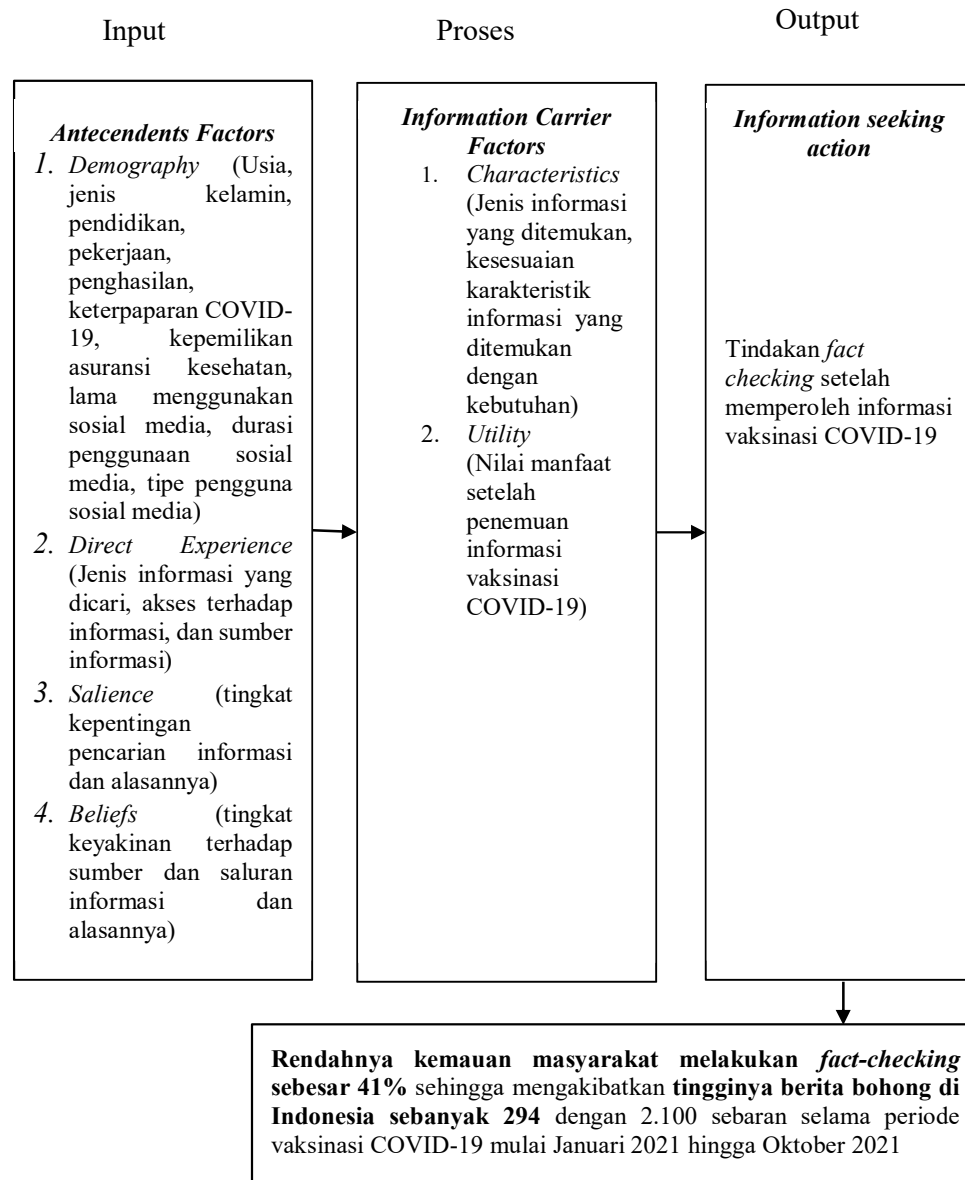
Tabel 1.4 Penggunaan *Website Fact Checking* Tahun 2019

No	Negara	Persentase
1.	Egypt	49%
2.	Mexico	43%
3.	Indonesia	41%

Sumber: Ipsos Public Affairs (2019)

Berdasarkan Tabel 1.4 masalah penelitian yang diangkat adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk melakukan *fact-checking* sebesar 41% dalam mengatasi tingginya berita bohong di Indonesia sebanyak 294 dengan 2.100 sebaran selama periode vaksinasi COVID-19 mulai Januari 2021 hingga Oktober 2021.

1.2 Identifikasi Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Gambar 1.1 merupakan kerangka identifikasi masalah dari rendahnya kemauan masyarakat untuk melakukan *fact-checking* tentang vaksinasi COVID-19, yakni sebesar 41%. Berikut merupakan beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi permasalahan:

1. *Antecedants factors* (faktor latar belakang)

a. *Demography* (Demografi)

Demografi merupakan ilmu untuk mempelajari segala sesuatu berdasarkan keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, seperti perubahan fisik, peradaban, intelektual, moral, dan sebagainya. Faktor demografi meliputi karakteristik sosial, ekonomi, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, dan sebagainya (Marhaeni, 2018). Latar belakang individu berdasarkan faktor tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir maupun bersikap ketika menghadapi banyaknya informasi yang beraneka ragam sehingga berdampak pada tindakan yang diambil. Contohnya orang yang berpendidikan tinggi ketika menghadapi berita baru cenderung akan berpikir kritis dan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum bertindak lebih lanjut.

b. *Direct experience* (Pengalaman langsung)

Pengalaman langsung dapat mempengaruhi sikap seseorang. Sikap yang dibentuk oleh pengalaman langsung dianggap menjadi prediktor kuat. Pengalaman langsung cenderung lebih informatif

dan informasi yang diperoleh langsung dipandang lebih kredibel dan dapat dipercaya.

c. *Salience* (Arti penting)

Faktor ini merupakan faktor yang memicu seseorang untuk menemukan arti penting dari pencarian sebuah informasi yang tepat. Ketika seseorang menganggap sesuatu penting maka orang tersebut akan memperoleh motivasinya sehingga dapat melakukan pencarian informasi yang tepat dan akurat untuk menyelesaikan permasalahan atau sesuatu yang dibutuhkan.

d. *Beliefs* (Keyakinan)

Keyakinan harus dikelola dengan baik karena menjadi kunci dalam melakukan diseminasi informasi terkait berita seputar pandemi (Purwaningtyas, 2020). Jika sudah muncul ketidakpercayaan maka baik berita baik atau buruk akan sulit diterima. Keyakinan yang tidak didukung dengan pengetahuan yang baik juga berpotensi meningkatkan penyebaran berita bohong terlebih adanya budaya dan keyakinan yang berbeda-beda di lingkungan sekitar. Jika keyakinan individu rendah maka akan sulit dalam menerima suatu informasi, aspirasi dan komitmen akan rendah pula sehingga semakin mudah untuk menyebarkan berita tidak benar (Ariantini and Herawati, 2017).

2. *Information carrier factors*

a. *Characteristics* (Karakteristik)

Karakteristik merupakan ciri khas yang dimiliki seseorang dalam merasakan, meyakini serta bertindak. Karakteristik ini mencakup persepsi individu dalam memilih sumber informasi yang kredibel. Ketika karakteristik yang dicari sesuai dengan kebutuhan individu maka dapat bermanfaat untuk orang lain .

b. *Utility* (Kegunaan)

Setiap informasi akan bermanfaat jika faktor yang telah disebutkan sebelumnya sudah sesuai. Selain itu akan berguna ketika informasi sesuai dengan kebutuhan sehingga individu akan memiliki kemauan untuk memanfaatkan berdasarkan permasalahan yang dimiliki.

3. *Information seeking action*

Faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelumnya sehingga penemuan informasi dapat dilakukan secara maksimal hingga memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. *Fact-checking* merupakan salah satu tren penting di dunia jurnalisme khususnya pada era digital. *Fact-checking* merupakan proses untuk menentukan apakah suatu berita sesuai dengan kenyataan atau telah dimanipulasi (López-Marcos and Vicente-Fernández, 2021). Meski pemegang tonggak adalah para jurnalis namun individu tetap harus memiliki kemampuan untuk melakukan *fact-checking* melalui

platform yang telah disediakan pemerintah. Jika tidak melakukan tahap tersebut maka dapat berisiko meningkatkan kemudahan dalam menyebarkan berita bohong.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi penyebab masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran faktor demografi responden, meliputi karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, keterpaparan COVID-19, kepemilikan asuransi kesehatan) dan karakteristik penggunaan sosial media responden (lama menjadi pengguna sosial media, durasi penggunaan sosial media, dan tipe pengguna sosial media)?
2. Bagaimana pengalaman responden dalam mengakses informasi tentang vaksinasi COVID-19?
3. Bagaimana tingkat kepentingan dalam mencari informasi vaksinasi COVID-19 menurut responden?
4. Bagaimana tingkat keyakinan responden terhadap sumber dan saluran informasi dalam melakukan pencarian informasi vaksinasi COVID-19?
5. Bagaimana kesesuaian informasi vaksinasi COVID-19 yang ditemukan dengan kebutuhan responden?
6. Bagaimana nilai manfaat dari penemuan informasi vaksinasi COVID-19 menurut responden?

7. Bagaimana tindakan *fact checking* responden setelah mendapatkan informasi vaksinasi COVID-19?
8. Apa saja faktor prediktor yang dapat mempengaruhi tindakan *fact checking* setelah menemukan informasi vaksinasi COVID-19?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Menganalisis prediktor *fact-checking habit* masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 dalam mengatasi tingginya sebaran berita bohong.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Menganalisis gambaran faktor demografi responden, meliputi karakteristik demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, keterpaparan COVID-19, kepemilikan asuransi kesehatan) dan karakteristik penggunaan sosial media responden (lama menjadi pengguna sosial media, durasi penggunaan sosial media, dan tipe pengguna sosial media).
2. Menganalisis pengalaman responden dalam mengakses informasi tentang vaksinasi COVID-19.
3. Menganalisis tingkat kepentingan dalam mencari informasi vaksinasi COVID-19 menurut responden.

4. Menganalisis tingkat keyakinan responden terhadap sumber dan saluran informasi dalam melakukan pencarian informasi vaksinasi COVID-19.
5. Menganalisis kesesuaian informasi vaksinasi COVID-19 yang ditemukan dengan kebutuhan responden.
6. Menganalisis nilai manfaat dari penemuan informasi vaksinasi COVID-19 menurut responden.
7. Menganalisis tindakan *fact checking* responden setelah mendapatkan informasi vaksinasi COVID-19.
8. Menganalisis faktor prediktor yang mempengaruhi tindakan *fact checking* setelah menemukan informasi vaksinasi COVID-19

1.4.3 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai wadah mengaplikasikan ilmu yang diberikan di bangku perkuliahan juga menambah wawasan dan pengalaman khususnya dalam melakukan analisis kebiasaan *fact-checking* di masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam mengatasi penyebaran berita bohong terkait isu kesehatan vaksinasi COVID-19.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Diharap penelitian ini menjadi arsip penelitian ilmiah bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan kedepannya dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang berkaitan dengan kebijakan vaksinasi, berita bohong, *fact-checking*, dan pengaruhnya terhadap program kesehatan. Sekaligus dapat memicu ide kreatif mahasiswa untuk memberikan rekomendasi untuk kebijakan vaksinasi COVID-19 dan peningkatan strategi promosi kesehatan terkait *fact-checking*.

3. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan masukan bagi pemegang kebijakan vaksinasi COVID-19, petugas pencegahan dan promosi kesehatan sekaligus pembuat *website* pemeriksa fakta, dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan strategi program sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19 guna mencegah penyebaran berita bohong supaya program yang diselenggarakan dapat lebih efektif dan efisien. Diharap dapat membantu meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19. Selain itu pembahasan *fact-checking* akan bermanfaat menjadi referensi dalam menghadapi kasus lain tidak hanya COVID-19.

4. Bagi Masyarakat

Menjadi pengingat bahwa masyarakat tetap harus sadar dan berhati-hati dalam menghadapi berita bohong. Selain itu diharap juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebiasaan *fact checking* setelah menemukan informasi. Ketika masyarakat dapat menerima edukasi mengenai *fact-checking* maka dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 melalui sumber informasi yang akurat dan pemanfaatan website *fact-checking* pun menjadi lebih efektif. Dengan begitu harapannya dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19.